

jurnal ilmiah pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat

andragogia

Volume 10 No 1 - Juni 2017

**Efektifitas Pelaksanaan Uji Coba Model Pendidikan Kecakapan Kerja Satuan
Pengamanan Sektor Pariwisata**
Agus Wahyono

**Metode Experimental Learning di Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah**
Andriyanto¹, Febri Hartanti Purbaningrum², Sulaiman³

**Peran Guru Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini Dalam Menyiapkan Generasi
Emas Indonesia 2045**
Eem Kumiasih¹, Lusi Rachmiazasi M², Stefani Nawati Eko Resti³

**Pengaruh Teknik Penilaian Penugasan dan Kecerdasan Interpersonal Terhadap
Hasil Belajar Siswa**
Gabriel Sahrundi

**Implementasi Model Mengenalkan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa pada Anak
Usia Dini Melalui Cerita di PAUD Tunas Harapan Wedung, Kabupaten Demak**
Heru Djoko Walojo, Zumrotul Hasanah, Rudiyono,
Sri Rahayuningsih, Sari Pumamawati

**Pelibatan Orang Tua/Keluarga pada Program Paket C di Satuan Pendidikan
Nonformal (SKB) Kabupaten Kendal**
Sanoto Hadi

**Pemanfaatan Buku Teks Matematika dalam Upaya Peningkatan Kreatifitas
Kemampuan Berpikir Peserta Didik**
Sri Haryati



PP PAUD DIKMAS

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah
Bekerja sama dengan Kaprodi PLS Pasca Sarjana UNNES Semarang

Aun
Lusi RM

Pengarah:

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd

Penanggungjawab:

Drs. Suka, M.Pd

Ketua Penyunting:

Dra. Riyati Anggoro Peni, M.Pd

Penyunting Pelaksana:

Yuniarti, M.Hum

Bibit Solekhah, M.Pd

Ana Kristiani, M.Pd

Jendra

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo

Pelaksana Administrasi:

Febri Hartanti P, M.Pd

Arif Wibowo, ST

Dedy Haryanto, S.Kom

Rudiyanto, S.Si

Rahmawati K, S.Pd

Aris

Catur A

Lulu

Pelaksana Teknis:

Rakhmat Gunarja, S.Pd

Sri Rahayuningsih, S.Pd

Diterbitkan oleh:

PP-PAUDNI Regional II

Semarang

Bekerja sama dengan

Kaprodi PLS Pascasarjana

UNNES Semarang

Alamat Redaksi:

Jl. Diponegoro 250 Ungaran

Semarang, Jawa Tengah.

Telp. 024-6921187

Fax. 024-6922884

jurnal ilmiah
pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat

andragogia

Volume 10 No 1 - Juni 2017

Daftar Isi

Efektifitas Pelaksanaan Uji Coba Model Pendidikan Kecakapan Kerja Satuan Pengamanan Sektor Pariwisata
Agus Wahyono

Metode Experimental Learning di Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Andriyanto, Febri Hartanti Purbaningrum, Sulaiman

Peran Guru Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini Dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045
Eem Kurniasih, Lusi Rachmiazasi M,
Stefani Nawati Eko Resti

Pengaruh Teknik Penilaian Penugasan dan Kecerdasan Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Siswa
Gabriel Sahrundi

Implementasi Model Mengenalkan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa pada Anak Usia Dini Melalui Cerita di PAUD Tunas Harapan Wedung, Kabupaten Demak
Heru Djoko Walojo, Zumrotul Hasanah, Rudiyono,
Sri Rahayuningsih, Sari Purnamawati

Pelibatan Orang Tua/Keluarga pada Program Paket C di Satuan Pendidikan Nonformal (SKB) Kabupaten Kendal
Sanoto Hadi

Pemanfaatan Buku Teks Matematika dalam Upaya Peningkatan Kreatifitas Kemampuan Berpikir Peserta Didik
Sri Haryati

PERAN GURU PENDIDIKAN DEMOKRASI ANAK USIA DINI DALAM MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2045

Eem Kurniasih¹, Lusi Rachmiazasi M², Stefani Nawati Eko Resti³

Abstrak

Dalam menyongsong Indonesia Emas di Tahun 2045 atau yang disebut dengan generasi emas Indonesia 2045 peran pendidikan menjadi penting. Sehingga diperlukan manajemen tenaga pendidikan yang profesional.

"Untuk mewujudkan generasi emas, seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki jiwa profesional yang berkarakter dan inovasi, serta menjadi teladan".

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkekuwalitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menyadari, bahwa melalui pendidikan yang demokratis bangsa kita menjadi maju dan dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, baik dalam bidang sains dan teknologi maupun ekonomi. Peran pendidikan penting juga dalam membangun peradaban bangsa yang berdasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. Apapun persoalan bangsa yang dihadapi komitmen kita untuk melaksanakan pembangunan pendidikan demokratis sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipegang.

Pendidikan demokrasi pada anak usia dini memang tidak bisa dipelajari secara instan. Nilai-nilai demokrasi semestinya sudah disosialisasikan pada seseorang sejak mereka masih mengijak usia dini, program ini penting maka judul: "Peran Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini perlu disiapkan sebagai Generasi Emas Indonesia 2045", perlu dimunculkan dengan gaya kehidupan yang demokrasi ketika seseorang dewasa nanti. Khalil Gibran menyatakan dalam puisinya,....."anak merupakan putra – putri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri, yang jiwanya adalah penghuni rumah masa depan, yang kehidupannya akan terus berlangsung tiada henti, sampai segala sesuatunya berakhir".

Kata kunci: peran guru, pendidikan demokrasi, generasi emas Indonesia 2045

THE ROLE OF EARLY CHILDHOOD DEMOCRACY EDUCATION TEACHER IN PREPARING INDONESIAN GOLD GENERATION 2045

Eem Kurniasih¹, Lusi Rachmiazasi M², Stefani Nawati³

Abstract

In facing Gold Indonesia in 2045 or it called golden generation of Indonesia in 2045 educational role become important. So that, it necessary management professional educators.

"To create the golden generation, an educator and education personnel must have the soul of a professional character and innovative, also able to be a role model".

Education is an instrumental in forming good or bad the human person according to the size of the normative. Realize this, the government is very serious about dealing with education, because through a good education system is expected to appear the next qualified generation and able to adapt to live in a society, nation and state. We realize that through democ-

matic education our nation become developed and could catch up with other nations, both in the field of science and technology also economy. The education role is also important in building a civilization which is based on identity and national character. Whatever the national problems which are facing our commitment to implement the democratic education development in accordance with the mandate of the Constitution and various law regulations in force still must be held.

Democracy education in early childhood cannot be learned instantly. Democratic values should have been socialized to each individual since they were treading an early age, this program is essential hence the title: "The Role of Early Childhood Education Democracy needs prepared as the Indonesia Golden Generation 2045", must engage with the democratic lifestyle when a person grows up, Khalil Gibran expressed in his poem "Children are the sons and daughters of the Living longing to themselves, that their soul are the future residents, whose life will continue endlessly, till everything ends".

Keywords: teachers' role, democracy education, Indonesia golden generation in 2045

A. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pendidikan merupakan salah satu pondasi suatu negara dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Sistem pendidikan terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam membentuk anak usia dini yang memiliki karakter dan berjiwa diri serta cinta tanah air. Pendidikan demokrasi adalah salah satu sistem pengembangan pendidikan yang di bentuk pemerintah guna ditanamkan kepada anak sejak usia dini sehingga dapat mempersiapkan generasi muda yang dapat berfikir kritis dan bertindak demokratis guna menuju indonesia emas pada tahun 2045.

Sihono, Teguh (2011: 1) berpendapat bahwa Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 Masehi, telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor pembangunan lain yang berbasis kedaerahan. Otonomisasi sektor pendidikan berusaha mengkondisikan sekolah agar kepala sekolah, guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas hasil belajar.

Masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses pemanusiaan. Masyarakat madani tidak lahir dengan sendirinya karena memerlukan sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat otoriter. Oleh sebab itu perubahan dari masyarakat otoriter dan sentralistis menuju kepada masyarakat demokratis yang mengakui akan hak-hak asasi manusia serta menghargai adanya perbedaan antar anggotanya, dan dalam hal ini memerlukan suatu proses pembentukan pribadi melalui proses pendidi-

kan, salah satunya adalah pendidikan di sekolah dimana unsur terpenting didalamnya selain guru, siswa, adalah pelajaran yang diperoleh siswa di sekolah.

Menurut Zamroni dalam Suharto, Toto (2005: 324) mengemukakan bahwa demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari *responsibility* ke arah *accountability* dan pelaksanaan evaluasi dengan esei dan porto folio. Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Dari pembahasan diatas peran guru dalam pendidikan demokrasi anak usia dini sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan demokrasi yaitu bertujuan ketika dewasa kelak memiliki sikap demokratis terhadap hak-hak orang lain dan dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Anak usia dini merupakan aset penting dalam menuju indonesia emas pada tahun 2045, sehingga pendidikan demokrasi pada anak usia dini perlu disiapkan sejak sekarang khususnya pada lembaga sekolah guna membentuk masyarakat yang demokrasi. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. "Bagaimana peran guru dalam pendidikan demokrasi anak usia dini guna menyiapkan generasi emas Indonesia 2045?"
2. "Mengapa tujuan pendidikan demokrasi pada anak usia dini perlu diajarkan dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045? "

B. PEMBAHASAN

1. Peran Guru Dalam Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini Guna Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045
 - a. Peran Guru

Soekanto, Sarjono (1982: 48) berpendapat bahwa peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Peranan juga dikatakan perilaku atau lembaga yang punya arti penting bagi struktur sosial. Dalam hal ini maka, kata peranan lebih banyak mengacu pada penyesuaian diri pada suatu proses. Sedangkan menurut Purwodarminto, WJS (1991 : 735) guru secara etimologis adalah orang yang pekerjaannya (mata pencaharian, profesinya) adalah mengajar.

Ahmadi Abu dan Uhbiyati Nur (2001: 48) mengemukakan secara umum peranan seorang guru ialah mendidik, yaitu membantu dalam mengupayakan perkembangan peserta didik dalam mengoptimalkan segala potensi hidupnya. Dalam hal ini setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa menjadi seorang guru :

- 1) Kewibawaan yaitu pengaruh positif normatif yang diberikan kepada orang lain atau anak didik dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Dengan kewibawaan, maka secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kepercayaan diri peserta didik kepada pendidik sehingga dengan sendirinya akan timbul suatu kepatuhan dari peserta didik kepada pendidik.
- 2) Pendidik harus mengenal secara pribadi peserta didiknya. Sebagai contoh, secara otomatis pendidik hafal nama asuhannya (terutama untuk pendidik anak luar biasa).
- 3) Pendidik harus mengetahui bahwa peserta didik adalah "aku" yang berpribadi dan ingin bertanggung jawab, dan ingin menentukan diri sendiri.

4) Sedangkan Al-Ghazali dalam Syaefuddin, A (2005: 124) memberikan delapan batasan yang ketat bagi profesi pendidik sebagai syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 5) Pendidik harus mempunyai sifat kasih sayang terhadap anak didik serta mampu memperlakukan mereka sebagaimana anak sendiri. Sifat kasih sayang pendidik pada akhirnya pada akhirnya akan melahirkan keakraban, percaya diri, dan ketentraman belajar. Suasana yang kondusif inilah yang mempermudah proses transformasi ilmu pengetahuan.
- 6) Pendidik melakukan aktifitas karena Allah SWT. Artinya, pendidik tidak melakukan komerseialisasi dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah saran transfer ilmu pengetahuan yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berilmu.
- 7) Pendidik harus memberi nasehat yang baik kepada anak didik. Seperti, pendidik harus mengarahkan peserta didik dalam tahapan-tahapan belajar.
- 8) Pendidik harus mampu mengarahkan anak didik kepada hal-hal yang positif dan mencegah mereka melakukan aktifitas yang destruktif. Segala bentuk nasehat ini

dilakukan dengan cara yang halus dan tidak melukai perasaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi mereka dalam kerangka proses belajar.

9) Mengenali tingkat nalar dan intelektualitas anak didik. Pendidik harus mengenali perbedaan individu anak didik. Sehingga dapat diidentifikasi kemampuan khususnya. Dalam konteks ini pendidik dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan "bahasa" mereka agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

10) Pendidik harus dapat menumbuhkan kegairahan peserta didik terhadap ilmu yang dipelajarinya tanpa menimbulkan sikap apriori terhadap disiplin ilmu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak didik terjebak pada sikap fanatik terhadap suatu disiplin ilmu melainkan yang lain.

11) Pendidik harus mampu mengidentifikasi kelompok anak didik usia dini dan secara khusus memberikan materi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Kelompok usia dini ini lebih tepat diberi ilmu praktis, tanpa argumentasi yang berat dan melelahkan.

12) Guru bersedia mengamalkan ilmunya, sehingga yang ada adalah menyatukan ucapan dan tindakan.

Dari pembahasan tentang peranan guru diatas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga membantu peserta didik dalam mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi hidupnya

b. Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini

Kartono, Kartini (1997: 77) berpendapat bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Sedangkan Suharto, Toto (2005: 325) berpendapat bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat.

Kartono, Kartini (1997: 196) berpendapat bahwa demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu "demokrasi pendidikan" dan "pendidikan demokrasi". Demokrasi pendidikan dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut

menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Adapun Usman dalam Suharto, Toto (2005: 327) berpendapat bahwa pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di tingkat lokal. Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Suharto, Toto (2005: 328) berpendapat bahwa pendidikan demokrasi menuntut adanya perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*. Proses pendidikan selama ini terkesan menganut asas *subject matter oriented*, yaitu bagaimana membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. Dengan orientasi seperti ini dapat dihasilkan lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil, tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah afektif. Padahal ranah afektif sama penting perannya dalam membentuk perilaku peserta didik.

Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus *top down*, namun diimbangi dengan *bottom up*. Tidak ada lagi pemaksaan kehendak dari pendidik, tetapi akan terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam setting diskusi.

John Dewey dalam Zamroni (2007: 50) menyatakan bahwa terdapat beberapa

nilai-nilai demokrasi yaitu: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku.

1) Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

2) Menghargai perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

3) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

4) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

5) Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

6) Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai mahluk individu dan sekaligus mahluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam men-

yelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

7) Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu bergantung diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

8) Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pembahasan mengenai nilai demokrasi secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam Pendidikan Demokrasi, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Pendidikan demokrasi bagi anak usia dini sangat membantu peserta didik guna bekal saat mereka dewasa sehingga membentuk perilaku yang dapat memahami pendapat dan hak-hak orang lain. Pendidikan demokrasi bagi anak usia dini dapat lebih mudah dicerna oleh peserta didik karena pada masa anak usia dini merupakan masa emas dimana setiap informasi, tindakan di sekitar mereka mudah dipahami hingga mereka beranjak dewasa.

c. Generasi Emas Indonesia 2045

Sugiharto dalam Prasetyo, Yudhan K (2013: 5) berpendapat bahwa indonesia di tahun 2045, 31 tahun lagi, dari berbagai sumber dikatakan memiliki "bonus" demografi yang terus berlanjut dan akan berkontribusi atau sebaliknya berbencana pada berbagai sektor. Salah satu kontribusi bonus tersebut adalah pada sektor pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami masa kejayaan, seperti ungkapan bahwa *"In 2045 Indonesia better than Brazil and China"*.

Bonus demografi di tahun 2045 akan berkontribusi atau berbencana menjadi semakin nyata, tergantung bagaimana kita menyiapkan generasi saat ini yang 31 tahun lagi akan mengisi era itu. Jika dimulai saat ini, 2013/2014, maka merekalah

yang pada saat itu berusia 30 hingga 40 tahun yang disebut mencapai usia produktif, generasi emas. Harapan terhadap generasi emas 2045 merupakan jawaban terhadap fenomena Paradoksial tentang Indonesia. Fenomena ini dikemukakan oleh Prof. BJ Habibie pada Silaknas di Kendari pada tahun 2011 dalam Prasetyo, Yudhan K (2013: 5), bahwa:

- a. Kita kaya tapi miskin, yaitu SDA melimpah tapi miskin penghasilan.
- b. Kita besar tapi kerdil, amat besar wilayah dan penduduknya tapi kerdil dalam produktivitas dan daya saing.
- c. Kita kuat tapi lemah, kuat dalam anarkisme tapi lemah dalam tantangan global.
- d. Kita indah tapi buruk, indah dalam potensi dan prospeknya namun buruk dalam pengelolaannya.

Dari uraian fenomena-fenomena tentang keadaan di Indonesia di atas, perlu adanya terobosan yang dapat membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan maju, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu menyiapkan anak usia dini dengan memberikan nilai-nilai pendidikan demokrasi.

d. Peran Guru Pendidikan Demokrasi Anak Usia Dini

Peran guru dalam pendidikan demokrasi anak usia dini sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi sangat penting karena dapat membentuk karakter yang mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri, tidak bergantung diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku hingga dewasa kelak.

Salah satu peran guru adalah menjadi model bagi peserta didik. Menurut Djiwandono, Sri E. W (2006: 29) tidak menjadi soal apa yang dilakukan seorang guru, guru akan berakting sebagai seorang model bagi peserta didik. Dalam banyak kasus, guru tidak menyadari peranan mereka sebagai model. Peran guru begitu penting dalam menjadi model yang patut di contoh bagi peserta didik, agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian peserta didik. Guru harus mempunyai karisma yang tinggi. Semua perkataan, sikap dan perbuatan yang baik darinya akan memancar kepada peserta didik.

Guru seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas pembelajaran sehingga dapat memberikan contoh nyata kepada peserta didik secara langsung. Peran guru sangat membantu dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi khususnya pada anak usia dini, karena pada masa anak usia dini mudah menyerap dan meniru segala contoh dan sikap yang ada pada lingkungan. Anak usia dini merupakan pondasi bagi bangsa dan negara sebagai persiapan dalam menuju Indonesia emas yaitu pada tahun 2045.

2. Tujuan Pendidikan Demokrasi Pada Anak Usia Dini Dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045

Sihono, Teguh (2011: 5) berpendapat bahwa pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menstransformasikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, persamaan dan keadilan), serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis.

Adapun menurut Sihono, Teguh (2011: 5) terselenggaranya keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebhinnekaan pendidikan, perombakan materi pendidikan civics dan tantangan memperbaharui pendidikan kewarganegaraan.

a. Kebebasan Akademik

Pengaruh dan pengawasan yang bersifat indoktrinasi dari luar sekolah harus diminimalkan, sebaliknya kemandirian, memiliki kebebasan otonomi. Kebebasan akademik diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerja sama berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berfikir kreatif, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi bersama. Sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut. Kebebasan akademik menuntut sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik. Karena hubungan politik dengan pendidikan amatlah erat bahkan cenderung bersifat sosial alami. Seperti pernyataan Plato dan Aristoteles: Apapun yang diinginkan suatu negara, harus juga disediakan di sekolah.

b. Pendidikan Kebhinekaan

Kebhinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhineka Tunggal Ika, yang di dalamnya termasuk kehidupan pendidikan. Tujuan pendidikan "Ika", namun proses dalam mencapai tujuan bersifat "bhinneka". Kurikulum yang memuat pokok-pokok pembelajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah yang tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya, maupun sarana-prasarana pendidikan. Pendidikan kebhinnekaan menghargai dan mengakomodir perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan kemampuan. Oleh sebab itu perlu diper-

tanyakan suatu kebijakan yang bersifat dan berlaku seragam seperti Ujian Nasional (UN) perlu dipertanyakan. Kebijakan yang bersifat nasional akan cenderung melecehkan prinsip-prinsip kebhinekaan yang adil.

c. Perombakan materi pendidikan civics

Di era orde baru, sekolah berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu, dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif. Berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan diharapkan mendukung tercapainya terbentuknya perilaku politik tertentu. Alam pendidikan politik yang indoktrinatif, siswa mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk upacara yang penuh rasa keterpaksaan. Pendidikan kewarganegaraan penuh dengan doktrin dan informasi yang tidak diperlukan siswa. Maka awal proses reformasi, mutlak diperlukan reformasi pendidikan *school based management*, mulai dikembangkan, Sekolah harus memiliki kewarganegaraan. Prinsip indoktrinasi harus diminimalkan, karena memang tidak mungkin dihilangkan.

d. Tantangan memperbaharui pendidikan kewarganegaraan

Memperbaharui pendidikan kewarganegaraan dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan dari sisa-sisa orde baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Wujud nyata tantangan yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan. Fenomena ini memang tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga muncul di hampir semua negara bekas komunis di Eropa Timur, yang sedang mereformasi pendidikannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi pada anak usia dini yaitu perlunya memperbaiki pendidikan demokrasi dalam bidang yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebhinnekaan pendidikan, perombakan materi pendidikan civics dan tantangan memperbaharui pendidikan kewarganegaraan. Peran guru dan tanggung jawab guru begitu besar guna memberikan pendidikan demokrasi bagi anak usia dini dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan antara pendidik dengan peserta didik.
- b. Pendidikan demokrasi sangat penting ditanamkan kepada anak usia dini karena

melalui pendidikan demokrasi anak memiliki sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain guna menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

- c. Peran guru sangat membantu dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi khususnya pada anak usia dini, karena pada masa anak usia dini mudah menyerap dan meniru segala contoh dan sikap yang ada pada lingkungan.

2. Saran

- a. Guru sebaiknya mempersiapkan diri dalam mempelajari nilai-nilai demokrasi sehingga dalam mengaplikasikan kepada peserta didik dapat berjalan dengan lancar.
- b. Guru seharusnya menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas pembelajaran sehingga dapat memberikan contoh nyata kepada peserta didik secara langsung.
- c. Dalam menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) salah satunya dengan memberikan pendidikan demokrasi bagi anak usia dini.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Abu dan Uhbiyati Nur. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djiwandono, Sri E. W. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prasetyo, Yudhan K. 2013. *Generasi Emas 2045 sebagai Fondasi Mewujudkan Siklus Peradaban Bangsa Melalui Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*. Pontianak: Seminar Nasional Kurikulum 2013.
- Purwodarminto, WJS. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihono, Teguh. 2011. *Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan*. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Vol.8, No.1: 1-21. (<http://download.portalgaruda.org>)
- Soekanto, Sarjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Suharto, Toto. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat*. *Cakrawala Pendidikan*. Vol.1, No.3: 323-346. (<http://citation.itb.ac.id>)
- Syaefuddin, A. 2005. *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Pengembangan Pendidikan Islam Berdasarkan Prinsip Al-Qir'an dan Assunnah*. Bandung: Pustaka setia.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.